

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (Abd Rahman, B. P et.al, 2022).

Menurut Ki Hadjar Dewantara pendidikan sebagai tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, artinya pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan sebagai tuntunan tidak hanya menjadikan seorang anak mendapat kecerdasan yang lebih tinggi dan luas, tetapi juga menjauhkan dirinya dari perbuatan jahat. Ki Hadjar Dewantara memiliki konsep tentang pendidikan yang didasarkan pada asas kemerdekaan yang memiliki arti bahwa manusia diberi kebebasan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatur kehidupannya dengan tetap sejalan dengan aturan yang ada di masyarakat (Amaliyah, 2021).

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Melalui pendidikan, orang dapat menemukan hal baru untuk menghadapi tantangan dan persaingan zaman yang semakin ketat dan canggih. Dunia pendidikan perlu menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada pada masa ini. Kurikulum berperan penting dalam dunia pendidikan, salah satunya menjadi komponen utama dalam proses pencapaian tujuan pendidikan tersebut. Terselenggaranya proses pendidikan dalam kehidupan manusia disebabkan karena peradaban manusia yang selalu berkembang secara dinamis.

Pendidikan merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Pemerintah Indonesia terus melakukan pembaharuan kebijakan pendidikan, salah satunya melalui perubahan kurikulum. Kurikulum Merdeka hadir sebagai bagian dari transformasi pendidikan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pendekatan yang lebih fleksibel, kontekstual, dan berpusat pada peserta didik. Kurikulum ini memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk mengembangkan proses pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik, kondisi lingkungan sekolah, serta kebutuhan perkembangan zaman. Implementasi Kurikulum Merdeka juga menekankan penguatan kompetensi, karakter, serta pengembangan profil pelajar Pancasila.

Madrasah merupakan sebuah lembaga atau tempat dimana proses pembelajaran berlangsung. Menurut Sudarwan Danim, kepala Madrasah adalah guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala Madrasah. Menurut Trimo menyatakan bahwa kepala madrasah adalah seorang pemimpin dalam sebuah lembaga pendidikan dalam beberapa waktu tertentu. Menurut Sri Damayanti, kepala madrasah berasal dari dua kata, yaitu kepala dan madrasah, kata “kepala” dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga, sedangkan “madrasah” diartikan sebagai sebuah lembaga tempat menerima dan memberi pelajaran. Jadi, dapat dikatakan kepala madrasah merupakan pemimpin madrasah atau suatu lembaga tempat menerima dan memberi pelajaran (Sunaedi & Rudji, 2023).

Peran kepala madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan tidak hanya didasarkan pada teori kepemimpinan pendidikan, tetapi juga memiliki landasan hukum yang jelas. Menurut Endang Mulyasa, dalam jurnal jendela pendidikan menjadi Kepala Sekolah Profesional menyatakan bahwa setidaknya ada tujuh peran utama yang dikenal dengan konsep EMASLIM, yaitu sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator. Ketujuh peran tersebut menunjukkan bahwa kepala madrasah tidak hanya bertugas

mengelola administrasi lembaga, tetapi juga membina guru, mengembangkan inovasi, serta memimpin seluruh kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan sekolah (Sari et al. 2021).

Secara yuridis, peran kepala madrasah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa pengelolaan satuan pendidikan dilakukan untuk menjamin mutu pendidikan melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Dalam pelaksanaannya, kepala madrasah berperan sebagai penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

Tugas pokok kepala sekolah diatur dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 15, yang menyatakan bahwa beban kerja kepala sekolah sepenuhnya digunakan untuk melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru serta tenaga kependidikan. Tugas manajerial berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi program sekolah. Pengembangan kewirausahaan dilakukan melalui penciptaan inovasi dan budaya kerja yang mendukung kemajuan sekolah. Adapun supervisi bertujuan meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan agar proses pembelajaran berlangsung secara efektif.

Dengan demikian, konsep EMASLIM yang dikemukakan oleh Mulyasa memiliki kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peran sebagai manajer, administrator, dan leader tercermin dalam tugas manajerial; peran inovator berkaitan dengan pengembangan kewirausahaan sedangkan peran edukator, supervisor, dan motivator diwujudkan melalui kegiatan pembinaan serta supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu, teori EMASLIM dapat digunakan sebagai landasan untuk menganalisis peran kepala madrasah dalam mendukung keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka di MAN 1 Kota Cirebon.

Kepala madrasah memainkan peran strategis dalam mendukung suksesnya penerapan Kurikulum Merdeka. Sebagai pemimpin pendidikan, kepala madrasah bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan. Lebih dari itu, kepala madrasah juga berperan sebagai penggerak perubahan, fasilitator peningkatan kompetensi guru, dan penjamin mutu pelaksanaan kurikulum. Menurut Nawawi (2020) dalam Jurnal Pendidikan Multidisiplin, kepala sekolah atau madrasah yang efektif mampu menciptakan iklim belajar yang inovatif dan mendukung transformasi kurikulum di satuan pendidikan.

Adapun ayat Q.S An-Nisa ayat 58 yang menjelaskan tentang Peran Kepala Madrasah :

إِنَّ أَوَّلَ مَوْزِعَةٍ أَنْتُمْ أَنْتُزِدُوا الْأَمْنَتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمُ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ أَوَّلَ نِعْمَةٍ
يُعْطِيكُمْ بِهَا إِنَّ أَوَّلَ مَا كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا

Artinya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil"(Q.S An-Nisa : 58)

Menurut tafsir Sayyid Quthb, amanah dan keadilan merupakan kewajiban utama seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya. Tafsir tersebut dapat dikaitkan dengan peran kepala madrasah sebagai pemimpin pendidikan yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola madrasah sesuai nilai-nilai Islam. Kepala madrasah harus mampu menjalankan amanah dengan membimbing guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik agar implementasi Kurikulum Merdeka berjalan sesuai tujuan pendidikan. Amanah ini tercermin dalam kesungguhan kepala madrasah dalam mengembangkan kualitas pembelajaran, menjaga kepercayaan warga madrasah, serta mengarahkan seluruh

program pendidikan berdasarkan nilai keislaman dan aturan yang berlaku (Sayyid Quthb, Fi Zhilal al-Qur'an, Jilid 2, tafsir QS. An-Nisa' ayat 58).

Selain itu, tafsir tersebut juga menekankan pentingnya keadilan dalam memutuskan suatu perkara. Dalam peran kepala madrasah, keadilan diwujudkan melalui sikap objektif terhadap seluruh guru dan siswa tanpa membedakan latar belakang tertentu. Kepala madrasah harus adil dalam pembagian tugas, pemberian kesempatan pelatihan, supervisi, serta pengambilan keputusan di lingkungan madrasah. Dengan demikian, kepala madrasah tidak hanya berperan sebagai administrator pendidikan, tetapi juga sebagai pemimpin yang amanah, adil, dan bertanggung jawab dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah.

Adapun perintah untuk memutuskan hukum secara adil di antara manusia, maka nash ini bersifat mutlak yang artinya meliputi keadilan menyeluruh “di antara semua manusia”, bukan keadilan di antara sesama Muslim dan terhadap para Ahli Taurat saja. Keadilan adalah hak setiap manusia karena ia diidentifikasi sebagai manusia. Taat kepada Allah, Rasul, dan Ulil Amri Sebagai Patokan Pelaksanaan Amanat (QS. An-Nisa Ayat 59)

Implementasi Kurikulum Merdeka tidak hanya mengubah pola pembelajaran, tetapi juga menuntut transformasi dalam manajemen pendidikan di tingkat satuan pendidikan, termasuk di madrasah. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki karakteristik tersendiri yang menyatukan nilai-nilai keislaman dengan tuntutan pendidikan nasional. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah memerlukan kepemimpinan yang adaptif, visioner, dan transformative (Ainullah, Azisah, and Wayong 2025).

Perubahan kurikulum merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam kualitas pendidikan nasional. Kurikulum Merdeka hadir sebagai penyempurnaan kurikulum sebelumnya dengan memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan dan pendidik untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, karakteristik sekolah, dan perkembangan zaman. Kurikulum ini

menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, pengembangan kompetensi, serta fleksibilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran (Aulia 2025).

Kurikulum Merdeka juga memberikan kewenangan lebih besar kepada sekolah dalam mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan lokal. Hal ini menjadikan kepala sekolah sebagai pengambil keputusan strategis dalam menentukan arah pengembangan sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah berperan penting dalam mengelola sumber daya, melibatkan orang tua dan masyarakat, serta memastikan proses pembelajaran berjalan sesuai tujuan kurikulum (Aqodiah, Astini, and Hasanah 2024).

Menurut Novak (2020) dalam Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Kurikulum Merdeka menekankan pada pendekatan pembelajaran yang responsif, inklusif, dan berpusat pada siswa. Kurikulum ini dirancang untuk membantu siswa mengembangkan kompetensi-kompetensi abad ke-21 seperti pemecahan masalah, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Menurut Hermawan (2020) dalam Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, tujuan utama dari Kurikulum Merdeka adalah menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing global, berakhlak mulia, dan mampu menghadapi tantangan zaman. Strategi yang diusung meliputi penekanan pada pembelajaran berbasis proyek, pengembangan kurikulum lokal, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan keterampilan atau skill.

Dalam implementasinya, keberhasilan Kurikulum Merdeka tidak hanya bergantung pada kesiapan guru, tetapi juga pada kepemimpinan kepala madrasah sebagai pemimpin pendidikan. Kepala madrasah memiliki peran strategis dalam mengarahkan kebijakan sekolah, mengelola sumber daya manusia, serta memastikan pelaksanaan kurikulum berjalan secara optimal. Penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah berperan sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, inovator, dan motivator dalam mendukung implementasi Kurikulum Merdeka (Winarto and Rindaningsih 2025).

Menurut Fitriani et al. (2020), beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka meliputi komitmen dan kesiapan guru, dukungan dari kepala sekolah dan pemerintah, serta ketersediaan sumber daya dan infrastruktur pendukung. Keberhasilan implementasi dapat dilihat dari peningkatan kualitas pembelajaran, partisipasi aktif siswa, serta pengembangan keterampilan siswa yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Selain itu, kepemimpinan kepala sekolah juga berpengaruh terhadap profesionalisme guru melalui pembinaan dan pelatihan yang berkelanjutan. Implementasi Kurikulum Merdeka menuntut guru untuk lebih kreatif dan profesional, sehingga kepala sekolah harus mampu menjadi mediator dan motivator dalam pengembangan kompetensi guru (Mastur, 2023).

Namun, dalam praktiknya implementasi Kurikulum Merdeka masih menghadapi berbagai tantangan. Kondisi tersebut disebabkan belum optimalnya pemahaman guru terhadap konsep, strategi pembelajaran, dan sistem asesmen dalam Kurikulum Merdeka yang berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran, seperti media pembelajaran dan fasilitas teknologi, turut menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Implementasi Kurikulum Merdeka juga dipengaruhi oleh dinamika kebijakan pendidikan yang terus berkembang sehingga madrasah perlu melakukan penyesuaian secara berkelanjutan. Berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa peran kepala madrasah sangat penting sebagai pemimpin pendidikan yang bertugas mengarahkan, membina, mengawasi, serta memfasilitasi seluruh warga madrasah agar implementasi Kurikulum Merdeka dapat berjalan secara efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang secara bertahap diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia. Banyak pembaharuan terjadi dalam kurikulum ini, sehingga satuan pendidikan mengalami kendala dalam beradaptasi dan mengimplementasikan kurikulum merdeka pada satuan pendidikannya masing masing. Kepala sekolah sebagai tonggak kepemimpinan

dalam satuan pendidikan sekolah dasar memiliki andil yang sangat besar bagi kelancaran implementasi kurikulum merdeka. Dalam penelitian ini akan dijelaskan tentang peran kepala dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Cirebon (Adha and Fadhila 2023).

Menurut pendapat peneliti, implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah memerlukan peran Kepala Madrasah yang kuat dan efektif sebagai pemimpin pendidikan. Kepala madrasah tidak hanya bertugas menjalankan fungsi administratif, tetapi juga bertanggung jawab dalam mengarahkan seluruh program pendidikan agar sejalan dengan tujuan Kurikulum Merdeka. Melalui kepemimpinan yang baik, kepala madrasah dapat memastikan bahwa proses pembelajaran berlangsung secara fleksibel, inovatif, dan berpusat pada peserta didik.

Selain itu, kepala madrasah berperan penting dalam meningkatkan kompetensi guru sebagai pelaksana utama kurikulum. Kurikulum Merdeka menuntut guru untuk mampu menerapkan berbagai strategi pembelajaran yang kreatif, sehingga diperlukan pembinaan, supervisi, dan motivasi yang berkelanjutan dari kepala madrasah. Dengan adanya dukungan tersebut, guru akan lebih siap dalam memahami serta mengimplementasikan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka.

Di sisi lain, keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka juga dipengaruhi oleh kemampuan kepala madrasah dalam mengelola berbagai tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan. Keterbatasan sarana dan prasarana, pendanaan, serta pemahaman guru terhadap kurikulum baru membutuhkan solusi yang tepat dan terencana. Oleh karena itu, kepala madrasah harus mampu berinovasi, membangun kerja sama dengan berbagai pihak, serta mengoptimalkan sumber daya yang tersedia agar pelaksanaan Kurikulum Merdeka dapat berjalan secara efektif dan mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan.

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kota Cirebon sebagai lembaga pendidikan Islam negeri juga dituntut mampu mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara optimal. Hal ini memerlukan kepemimpinan kepala madrasah yang mampu mengintegrasikan kebijakan kurikulum dengan karakteristik madrasah, kebutuhan peserta didik, serta nilai-nilai keislaman yang menjadi ciri khas madrasah. Oleh karena itu, penelitian mengenai peran kepala madrasah dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Cirebon menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui strategi, kendala, serta upaya yang dilakukan dalam mutu pendidikan madrasah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara konsep ideal implementasi Kurikulum Merdeka dan realitas pelaksanaannya di madrasah. Secara normatif-konseptual, Kurikulum Merdeka dirancang untuk memberikan ruang otonomi yang lebih luas kepada satuan pendidikan dalam mengembangkan pembelajaran yang fleksibel, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Dalam konteks ini, kepala madrasah diposisikan sebagai aktor sentral yang tidak hanya berperan sebagai administrator, tetapi juga sebagai pemimpin pembelajaran (*instructional leader*) yang mampu menggerakkan perubahan budaya sekolah, membangun kolaborasi profesional guru, mengoptimalkan sumber daya, serta memastikan keterlaksanaan pembelajaran yang bermakna. Kepala madrasah juga diharapkan mampu melakukan transformasi manajerial berbasis visi yang jelas, pengambilan keputusan berbasis data, serta penguatan ekosistem pembelajaran yang mendukung pengembangan Profil Pelajar Pancasila.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi peran tersebut belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Terdapat indikasi bahwa sebagian kepala madrasah masih berada pada tahap adaptasi terhadap perubahan paradigma kurikulum, sehingga fungsi manajerial dan kepemimpinan pembelajaran belum sepenuhnya terintegrasi secara efektif. Hal ini diperparah oleh keterbatasan kompetensi dalam manajemen perubahan kurikulum,

kurangnya pengalaman dalam implementasi kurikulum berbasis otonomi, serta beban administratif yang masih mendominasi peran kepemimpinan. Selain itu, faktor eksternal seperti keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran berbasis teknologi, kesenjangan kesiapan guru dalam memahami pembelajaran berdiferensiasi dan proyek, serta keterbatasan pendanaan operasional turut memengaruhi efektivitas implementasi Kurikulum Merdeka. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan kurikulum belum sepenuhnya mencerminkan prinsip fleksibilitas, diferensiasi, dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sebagaimana yang diharapkan.

Kesenjangan pada aspek implementatif, terdapat pula kesenjangan pada aspek akademik dan empiris dalam kajian sebelumnya. Penelitian-penelitian terdahulu cenderung menitikberatkan pada implementasi Kurikulum Merdeka dari perspektif guru, peserta didik, atau proses pembelajaran secara umum, tanpa memberikan perhatian yang mendalam terhadap peran strategis kepala madrasah sebagai penggerak utama perubahan. Kajian yang ada juga masih terbatas dalam menguraikan bagaimana kepala madrasah mengintegrasikan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi dalam satu kesatuan kepemimpinan yang utuh untuk mendukung keberhasilan implementasi kurikulum. Selain itu, dimensi efektivitas kepemimpinan dalam konteks transformasi kurikulum, termasuk bagaimana kepala madrasah membangun budaya kolaboratif, meningkatkan kapasitas guru, serta mengatasi resistensi terhadap perubahan, masih belum banyak dikaji secara komprehensif, khususnya dalam konteks madrasah aliyah negeri.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan teoritis, empiris, dan kontekstual yang menunjukkan perlunya kajian yang lebih mendalam dan spesifik mengenai peran kepala madrasah dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Kesenjangan ini tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan fokus penelitian sebelumnya, tetapi juga pada kurangnya pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika kepemimpinan pendidikan dalam konteks transformasi kurikulum di madrasah.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara mendalam peran kepala madrasah dalam implementasi Kurikulum Merdeka di MAN 1 Kota Cirebon, mencakup strategi kepemimpinan, hambatan yang dihadapi, serta efektivitas upaya yang dilakukan dalam mewujudkan pembelajaran yang selaras dengan prinsip Kurikulum Merdeka dan penguatan Profil Pelajar Pancasila.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka penelitian ini berfokus kepada Peran Kepala Madrasah dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Cirebon yang diuraikan dalam pertanyaan penelitian berikut:

1. Kepala madrasah telah melakukan berbagai upaya dalam mendukung implementasi Kurikulum Merdeka, seperti memberikan arahan, melaksanakan supervisi, serta memfasilitasi pelatihan guru. Namun, masih diperlukan penguatan pada aspek koordinasi program dan pendampingan berkelanjutan agar pelaksanaan kurikulum dapat berjalan lebih optimal di madrasah.
2. Ketersediaan sarana pembelajaran berbasis Kurikulum Merdeka di MAN 1 Kota Cirebon masih belum sepenuhnya memadai. Hal ini menyebabkan sebagian guru masih menggunakan sumber belajar alternatif karena keterbatasan buku dan perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan kurikulum.
3. Pelaksanaan program pendukung Kurikulum Merdeka, termasuk Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), masih terkendala keterbatasan anggaran. Kondisi ini berdampak pada penyesuaian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sehingga belum seluruh program dapat terlaksana secara optimal.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan fokus, maka penelitian ini dibatasi pada:

1. Subjek penelitian meliputi Kepala Madrasah, Wakil Kepala bidang kurikulum dan guru mata pelajaran
2. Fokus Penelitian hanya membahas Peran Kepala Madrasah dalam implementasi Kurikulum Merdeka di MAN 1 Kota Cirebon.
3. Penelitian difokuskan pada strategi Kepala Madrasah dalam mengatasi kendala implementasi Kurikulum Merdeka.
4. Batasan konteks penelitian ini dilakukan di lingkungan MAN 1 Kota Cirebon selama tahun ajaran 2025/2026, dengan pendekatan kualitatif deskriptif.

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah, pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Kepala Madrasah dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di MAN 1 Kota Cirebon?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam implementasi Kurikulum Merdeka di MAN 1 Kota Cirebon?
3. Sejauh mana Efektivitas kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Mendukung Keberhasilan Implementasi Kurikulum Merdeka?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis Peran Kepala Madrasah dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di MAN 1 Kota Cirebon.
2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasi Kurikulum Merdeka di MAN 1 Kota Cirebon.
4. Menganalisis Efektivitas kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Mendukung Keberhasilan Implementasi Kurikulum Merdeka.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu manajemen pendidikan Islam, khususnya yang berkaitan dengan Peran Kepala Madrasah dalam Implementasi Kurikulum Merdeka. Selain itu, Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam mengkaji efektivitas kepemimpinan pendidikan, strategi implementasi kurikulum, serta pengelolaan perubahan pendidikan pada era transformasi kurikulum.

2. Manfaat Praktis

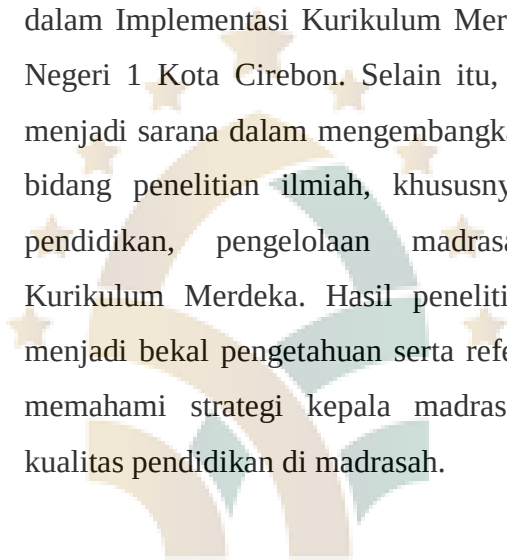
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak di madrasah.

- a. Bagi Madrasah, Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi yang lebih mendalam dalam menilai efektivitas kepemimpinan yang diterapkan, sekaligus menjadi pedoman strategis dalam merancang kebijakan, mengoptimalkan manajemen, serta memperkuat peran sebagai leader, manager, dan supervisor dalam Implementasi Kurikulum Merdeka. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat membantu kepala madrasah dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan berbasis data guna meningkatkan mutu pendidikan.
- b. Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Penelitian ini memberikan wawasan yang lebih luas mengenai pentingnya koordinasi, komunikasi, dan adaptasi terhadap perubahan kurikulum. Guru juga dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang inovatif,

meningkatkan kompetensi profesional, serta menciptakan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan sesuai dengan prinsip Kurikulum Merdeka.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengalaman secara langsung mengenai peran kepala madrasah dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Cirebon. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi sarana dalam mengembangkan kemampuan peneliti di bidang penelitian ilmiah, khususnya terkait kepemimpinan pendidikan, pengelolaan madrasah, dan implementasi Kurikulum Merdeka. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bekal pengetahuan serta referensi bagi peneliti dalam memahami strategi kepala madrasah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah.



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**